

Mahasiswa sebagai Agen Perubahan: Strategi Pencegahan Korupsi di Era Modern

Iwan Ridwan Paturochman *¹

Neng Mirna Dwi Yanti ²

Qonitah Az Zahra ³

Nur Elva Faradisa ⁴

^{1,2,3,4} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Siliwangi, Indonesia

*e-mail: iwanridwanpaturochman@yahoo.com ¹, nengmirnadwiyanti@gmail.com ²,
qonitahazzahra4@gmail.com ³, nurelvaf@gmail.com ⁴

Abstrak

Korupsi merupakan permasalahan serius yang menghambat pembangunan serta merusak tata kelola pemerintahan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menggali peran mahasiswa sebagai agen perubahan dalam pencegahan tindak pidana korupsi di era digital saat ini. Metode yang digunakan adalah kajian pustaka yang mengulas berbagai literatur dan kajian empiris terkait strategi, tantangan, dan inovasi mahasiswa dalam membangun budaya anti korupsi melalui pemanfaatan teknologi digital dan media sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa memiliki potensi besar sebagai penggerak utama dalam pendidikan, advokasi, dan pengawasan publik terhadap korupsi. Mereka melakukan kampanye aktif melalui seminar, diskusi, dan pengembangan aplikasi digital yang meningkatkan transparansi dan partisipasi publik. Namun rendahnya literasi digital dan hambatan struktural masih menjadi tantangan signifikan yang harus diatasi agar peran mahasiswa dapat lebih optimal. Implikasi hasil ini menekankan pentingnya integrasi nilai integritas dan anti-korupsi dalam prasyarat serta penguatan kapasitas literasi pelajar digital untuk mendorong pemberantasan korupsi yang efektif di masyarakat digital.

Kata kunci: Mahasiswa, Pencegahan Korupsi, Era Digital, Pendidikan Anti Korupsi, Literasi Digital, Media Sosial, Integritas, Inovasi Teknologi, Budaya Anti Korupsi

Abstract

Corruption is a serious problem that hinders development and undermines governance in Indonesia. This study aims to explore the role of students as agents of change in preventing corruption in the current digital era. The method used is a literature review that examines various literature and empirical studies related to strategies, challenges, and innovations of students in building an anti-corruption culture through the use of digital technology and social media. The results of the study show that students have great potential as key drivers in education, advocacy, and public oversight of corruption. They actively campaign through seminars, discussions, and the development of digital applications that increase transparency and public participation. However, low digital literacy and structural barriers remain significant challenges that must be overcome in order for students to play a more optimal role. The implications of these results emphasize the importance of integrating integrity and anti-corruption values into prerequisites and strengthening students' digital literacy capacity to promote effective corruption eradication in the digital society.

Keywords: Students, Corruption Prevention, Digital Era, Anti-Corruption Education, Digital Literacy, Social Media, Integrity, Technological Innovation, Anti-Corruption Culture

PENDAHULUAN

Korupsi telah lama menjadi masalah utama yang mengancam pembangunan serta merusak sistem pemerintahan dan keadilan sosial di Indonesia. Berbagai upaya pemberantasan korupsi telah dilakukan, namun muncul tantangan baru di era digital di mana modus dan akses korupsi semakin kompleks. Mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa memiliki peran strategis untuk menjadi agen perubahan yang menginisiasi pemberantasan korupsi melalui berbagai bentuk pendidikan, penguatan integritas karakter, dan pemanfaatan teknologi informasi. Dengan akses luas terhadap teknologi digital, mahasiswa dapat memperluas jangkauan kampanye antikorupsi, meningkatkan kesadaran masyarakat, serta mengembangkan inovasi berbasis digital yang mendukung transparansi dan akuntabilitas. Kendala yang ditemukan meliputi rendahnya literasi digital serta hambatan dari lingkungan sosial dan institusi. Oleh karena itu, kajian ini

mengkaji bagaimana peran mahasiswa di era digital dapat dioptimalkan sebagai kekuatan sosial yang mendorong budaya integritas dan anti-korupsi.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode *Literature Review* dengan mengulas sejumlah jurnal ilmiah, laporan penelitian, dan artikel akademik dari tahun-tahun terakhir yang membahas mengenai peran pelajar dalam pencegahan korupsi di era digital. Literatur yang mencakup tema pendidikan anti-korupsi, pengembangan karakter integritas, penggunaan media sosial sebagai alat kampanye dan pengawasan, serta inovasi teknologi dalam korupsi anggota. Analisis literatur ini dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk mengeksplorasi strategi dan praktik terbaik yang dilakukan mahasiswa, serta mengidentifikasi faktor penghambat seperti tidak adanya literasi serta dukungan institusional. Dengan pendekatan ini, penelitian menyusun kerangka konseptual yang menggambarkan kontribusi pelajar dan rekomendasi peningkatan peran mereka dalam gerakan anti-korupsi berbasis teknologi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Mahasiswa sebagai Agen Perubahan (Agent of Change)

Mahasiswa memegang posisi strategis sebagai agen perubahan yang memainkan peran krusial dalam membentuk budaya anti-korupsi melalui pendidikan. Sebagai generasi penerus bangsa, mereka bukan hanya objek pembelajaran tetapi juga agen aktif yang mampu membawa perubahan sosial menuju tata kelola yang transparan, akuntabel, dan bersih (Dewi et al., 2025).

1. Faktor Pendorong Pendidikan dan Kesadaran Masyarakat

Dengan akses yang luas ke sumber informasi dan teknologi, anak-anak memiliki kemampuan besar untuk memimpin pendidikan publik tentang bahaya korupsi dan nilai menjaga integritas. Mereka dapat menyelenggarakan seminar, diskusi, lokakarya, dan kampanye anti-korupsi yang menjangkau berbagai kelompok, sambil memperkuat kesadaran kolektif dalam upaya mencegah korupsi.

2. Transparansi dan Akuntabilitas di Kampus dan

Di lingkungan kampus dan masyarakat dapat berperan sebagai pengamat kritis terhadap penggunaan anggaran dan implementasi kebijakan. Tujuan analisis kritis ini adalah untuk memastikan setiap program beroperasi sesuai dengan peraturan dan mencegah ketidakberesan yang dapat mengarah pada praktik korupsi.

3. Gerakan Anti-Korupsi

Mahasiswa juga berperan sebagai penggerak utama dalam membangun gerakan sosial melawan korupsi, baik melalui organisasi internal kampus maupun melalui kerja sama dengan organisasi independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan organisasi non-pemerintah. Keterlibatan mereka dalam kampanye publik, pelaporan, dan advokasi merupakan strategi konkret untuk meningkatkan partisipasi publik dalam pemberantasan korupsi.

4. Mengembangkan Karakter dan Budaya Anti-Korupsi

Melalui pendidikan formal dan informal, siswa dapat belajar disiplin, kejujuran, dan tanggung jawab. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam konteks akademik dan sosial akan mendorong munculnya perilaku anti-korupsi, yang merupakan bagian dari karakter bangsa. Penerapan prinsip-prinsip ini dalam lingkungan akademik dan sosial akan mendorong munculnya perilaku anti-korupsi, yang merupakan bagian dari karakter bangsa.

5. Pencegahan Korupsi oleh Inovator dengan Teknologi Terdepan

Selain itu, mahasiswa juga diperkirakan akan menghasilkan berbagai inovasi berbasis teknologi yang mendukung pencegahan korupsi. Misalnya, dengan

mengembangkan aplikasi untuk mendeteksi korupsi, mengembangkan media kampanye digital, atau melakukan penelitian berbasis data untuk mendukung implementasi kebijakan publik secara transparan dan efisien.

B. Bentuk Korupsi di Era Modern yang Harus Diwaspadai Mahasiswa

1. Intensi Korupsi karena Gaya Hidup Hedonis

Kasus korupsi sering terjadi di lembaga pemerintah, yang meningkatkan kemungkinan praktik korupsi terjadi di kampus perguruan tinggi, yang merupakan cerminan dari lembaga pemerintah. Niat untuk terlibat dalam korupsi merujuk pada keinginan untuk berpartisipasi dalam aktivitas korup. Banyak orang, termasuk mahasiswa, ditemukan hidup dengan gaya hidup yang memprioritaskan kesenangan. Gaya hidup yang mengutamakan kesenangan adalah cara hidup yang fokus sepenuhnya pada pengejaran kesenangan. Ketika seseorang tidak memiliki cukup uang untuk mendukung gaya hidup hedonisnya, mereka mungkin tergoda untuk terlibat dalam korupsi (Dwi Sartika, 2018).

Faktor-faktor yang menyebabkan korupsi di Indonesia sangat bervariasi. Salah satu penyebabnya adalah gaya hidup yang berorientasi pada kemewahan dan kepuasan material. Pendapat ini sejalan dengan pernyataan Jenier (2013) bahwa korupsi merupakan salah satu konsekuensi dari gaya hidup yang berfokus pada kesenangan. Hal ini dapat dilihat dalam kasus korupsi yang melibatkan GT. Tindakan korupsi GT didorong oleh fasilitas yang ia peroleh dari jabatannya. Diketahui bahwa meskipun dalam kondisi sulit, pegawai dengan pangkat IIIA di Direktorat Jenderal Pajak ini tetap memilih berlibur di hotel mewah di Singapura, mempertahankan gaya hidup hedonisnya. Menurut Japarianto (Umami, 2013), hedonisme adalah konsep yang fokus pada kesenangan untuk memuaskan pikiran individu. Hopkinson dan Pujari (Kirgiz, 2014) menyatakan bahwa kesenangan adalah bentuk tertinggi dari keindahan, dan gaya hidup hedonistik bertujuan untuk mencari dan menikmati kesenangan tersebut. Aktivitas orang yang hidup dengan gaya hidup hedonistik biasanya terkait dengan kebiasaan hidup mewah, pengeluaran berlebihan, dan menghabiskan waktu untuk bersenang-senang (Wijaya, dalam Kusumastuti, 2006). Di Indonesia, kini sangat umum melihat orang-orang memilih gaya hidup hedonis. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya individu yang lebih memilih mengenakan pakaian, menggunakan tas, dan barang-barang lain dari merek terkenal, serta menggunakan teknologi terbaru pada ponsel mereka, berbelanja di mal modern, dan keluar rumah hanya untuk mengisi waktu luang. Gaya hidup hedonis tidak hanya umum di kalangan dewasa yang bekerja, tetapi juga lebih sering ditemukan di kalangan mahasiswa. Mahasiswa adalah individu yang sedang dalam proses mencari jati diri, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh perubahan dan memiliki rasa ingin tahu untuk mencoba hal-hal baru. Santrock (2008) menyatakan bahwa fase remaja akhir terjadi antara usia 18 dan 22 tahun (Dwi Sartika, 2018).

2. Korupsi Digital / Manipulasi Data

Meskipun teknologi telah membuka banyak peluang, masih ada masalah besar. Tidak semua siswa memiliki literasi digital yang cukup untuk memanfaatkan teknologi untuk mencegah korupsi secara optimal. Tidak banyak orang yang tahu bagaimana menggunakan platform digital dengan baik dan bagaimana mekanisme dan efek korupsi bekerja. Ini membuatnya sulit untuk memaksimalkan peran mereka. Selain itu, perlu ada peningkatan kesadaran kritis siswa tentang masalah korupsi di era digital. Ini dapat dicapai dengan memasukkan materi antikorupsi ke dalam kurikulum sekolah dan dengan melibatkan siswa secara langsung dalam gerakan sosial. Secara keseluruhan, kemajuan teknologi digital telah memberi mahasiswa banyak kesempatan untuk berpartisipasi

secara aktif dalam pencegahan korupsi. Mahasiswa memiliki potensi strategis untuk menjadi agen perubahan dalam memerangi korupsi di era digital. Mereka dapat memainkan peran kunci dalam menciptakan lingkungan sosial dan politik yang lebih transparan, bertanggung jawab, dan bebas dari korupsi dengan meningkatkan literasi digital dan kesadaran kolektif tentang pentingnya pencegahan korupsi (Lawrence, 2024).

Sebagai generasi yang lahir dan besar di tengah kemajuan teknologi, mahasiswa memiliki potensi besar untuk menggunakan teknologi untuk membantu mencegah korupsi. Mahasiswa memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang memiliki kemampuan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas publik melalui berbagai platform digital. Mahasiswa dapat menyuarakan pentingnya mencegah korupsi dan mengedukasi masyarakat tentang dampak buruk korupsi terhadap pembangunan sosial dan ekonomi jika mereka memiliki akses mudah ke blog, media sosial, dan platform digital lainnya. Dengan menyebarkan informasi yang benar dan mengajak orang lain untuk mencegah korupsi, mahasiswa dapat bertindak sebagai pengawal integritas dalam hal ini (Lawrence, 2024).

Meskipun ada potensi besar ini, kesadaran mahasiswa tentang tindak pidana korupsi di era digital masih menjadi masalah. Banyak siswa belum memahami secara menyeluruh bagaimana korupsi dapat terjadi dalam lingkungan digital. Ini karena, di era teknologi seperti saat ini, korupsi dapat terjadi dalam bentuk yang lebih tersembunyi dan sulit dideteksi, seperti melalui manipulasi data atau penggunaan aplikasi digital yang tidak transparan. Oleh karena itu, literasi digital yang lebih baik dan pemahaman yang lebih baik tentang korupsi berbasis teknologi sangat penting. Mahasiswa harus memahami bagaimana teknologi dapat digunakan untuk mencegah korupsi dan menghindari penyalahgunaannya untuk tindakan koruptif (Lawrence, 2024).

Menurut Santiadi (2019 dalam Lawrence, 2024), teknologi mendukung penggunaan sistem pengaduan online, yang mempercepat proses pengajuan pengaduan dan pencarian bantuan hukum. Hal ini memungkinkan teknologi untuk membawa keadilan kepada lebih banyak orang. Pengadilan online dan mediasi digital memberikan bantuan dalam menyelesaikan sengketa hukum. Pendekatan ini sangat bermanfaat bagi komunitas terpinggirkan yang kesulitan mengakses sistem hukum tradisional karena alasan lokasi, ekonomi, atau fisik. Para pihak dapat menyelesaikan sengketa dari lokasi masing-masing melalui penyelesaian sengketa online, yang mengurangi kebutuhan untuk bepergian dan biaya terkait. Digitalisasi membantu memperkecil kesenjangan keadilan dan menyediakan opsi yang lebih adil dan inklusif bagi semua orang. Dalam hal contoh lain, penggunaan teknologi jaman sekarang sering sekali terjadinya penipuan salah satunya adalah penipuan transfer melalui Mobile Banking. Penipuan Mobile Banking adalah ketika orang menggunakan layanan perbankan elektronik seperti transfer dana, pembayaran tagihan, atau menggunakan kartu kredit dengan cara yang merugikan mereka secara finansial. Ini dapat mencakup penipuan seperti pencurian informasi login, transaksi yang tidak sah, atau tindakan lainnya yang dilakukan melalui aplikasi atau platform perbankan yang digunakan melalui perangkat mobile seperti ponsel atau tablet. Sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang potensi penipuan yang dilakukan melalui mobile banking. Pengenalan strategi penipuan yang umum, cara mencegah penipuan, dan cara melaporkan tindakan mencurigakan dapat dimasukkan ke dalam materi pendidikan. Untuk menjaga keamanan finansial Anda, sangat penting untuk mencegah penipuan transfer mobile banking. Beberapa tindakan yang dapat diambil (Lawrence, 2024):

- a. Pendidikan dan Kesadaran: Sangat penting bagi pengguna untuk diberitahu tentang risiko penipuan dan praktik keamanan yang baik. Ini dapat dicapai melalui kampanye kesadaran masyarakat dan pedoman pengguna.
- b. Verifikasi Identitas: Pastikan bahwa pengguna yang melakukan transfer adalah pemilik akun yang sah dengan memverifikasi melalui metode otentikasi ganda seperti kode OTP atau biometrik (Amin, Rahman, 2023).
- c. Pemantauan Transaksi: Sistem pemantauan transaksi yang canggih dapat menemukan pola transaksi yang mencurigakan dan menghentikan transaksi yang tidak sah.
- d. Enkripsi Data: Pastikan bahwa semua data yang dikirim melalui aplikasi perbankan mobile dienkripsi menggunakan algoritma yang canggih untuk memastikan bahwa data tetap aman.
- e. Pembaruan Perangkat Lunak: Pastikan aplikasi perbankan mobile selalu tersedia dalam versi terbaru untuk memperbaiki kerentanan keamanan dan melindungi pengguna dari serangan yang sudah diketahui.
- f. Validasi Penerima: Sebelum melakukan transfer, periksa informasi penerima dengan cermat. Ini penting terutama untuk penerima yang baru atau tidak dikenal.
- g. Pemeriksaan Regular: Cari aktivitas akun, seperti saldo dan transaksi terakhir, untuk menemukan aktivitas yang mencurigakan.
- h. Laporkan Kecurangan: Laporkan segera ke bank atau penyedia layanan mobile banking untuk mencegah penipuan.

3. Korupsi Akademik /Integritas Akademik

Menurut Listianingsih (2016 dalam Reni Handayani et al., 2024). korupsi kini telah menjadi bagian dari budaya, bahkan menjadi topik yang selalu dibahas dan selalu relevan, terutama di Indonesia. Berbagai jenis korupsi terjadi, mulai dari suap kecil hingga korupsi besar-besaran seperti penyalahgunaan dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang mencapai triliunan rupiah. Insiden-insiden ini semakin menunjukkan bahwa korupsi telah merasuki masyarakat Indonesia. Pendidikan anti-korupsi merupakan salah satu solusi untuk mengatasi korupsi, karena dapat membantu menciptakan lingkungan budaya anti-korupsi yang positif untuk membentuk karakter generasi mendatang. Institusi pendidikan tinggi dapat memperkuat sembilan nilai integritas melalui Tri Dharma Pendidikan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat (Listianingsih, 2016). Menurut M Faadhilah Suhandi (2023 dalam Reni Handayani et al., 2024) pendidikan saat ini tidak sama dengan pendidikan di masa lalu, di mana pendidikan seharusnya bertujuan untuk membantu individu menjadi lebih baik dengan mempromosikan nilai-nilai moral dan intelektual. Sepertinya pendidikan saat ini kurang fokus pada pengembangan manusia secara holistik, baik secara fisik maupun spiritual, dan lebih berorientasi pada aspek materialistik, ekonomi, dan teknologi, tanpa memperhatikan nilai-nilai moral, kemanusiaan, dan karakter yang baik. Saat ini, terdapat penekanan yang jauh lebih besar pada kecerdasan intelektual, logika, dan penalaran, sementara pengembangan kecerdasan emosional, perasaan, dan emosi tidak mendapatkan perhatian yang sama. Akibatnya, apresiasi terhadap tujuan pendidikan dalam konteks nilai-nilai humanis, karakter yang baik, dan nurani menjadi minimal. Banyak orang telah kehilangan perasaan dan nurani mereka, yang membuat mereka menjadi lebih egois dan oportunistis.

Mahasiswa adalah elemen penting yang memberikan dampak baik, minimal di sekitarnya. Mereka memiliki kewajiban untuk meningkatkan pemahaman mengenai bahaya korupsi sebagai generasi yang akan datang. Korupsi muncul akibat dari sifat tamak, kebutuhan atau gaya hidup, keuntungan, kesempatan, serta materialisme atau konsumerisme (Reni Handayani et al., 2024).

Menurut Adisusanto (2013 dalam Reni Handayani et al., 2024), tindakan yang signifikan diperlukan dalam menerapkan sanksi untuk menciptakan efek jera. Kekhawatiran muncul karena pelaku korupsi ditemukan di lembaga pemerintah maupun swasta, dan melibatkan pemimpin yang seharusnya menjadi teladan bagi generasi muda. Perilaku korup dapat menyebar seperti sel kanker metastasis yang menyebar dengan cepat dan dapat menempel pada sel-sel lain dalam tubuh.

Menurut Widhiyaastuti (2018 dalam Reni Handayani et al., 2024). Sejumlah langkah telah diambil untuk mengurangi jumlah kasus korupsi yang terus meningkat di kalangan mahasiswa. Pemuda-pemudi menyadari bahwa korupsi di Indonesia merupakan masalah serius, melanggar hukum, dan merugikan banyak pihak. Namun, ketika diminta untuk mengadopsi sikap anti-korupsi, mereka masih belum siap, seperti tidak mencontek, tidak datang terlambat, dan tidak menyalahgunakan uang orang tua mereka.

Menurut Saifulloh (2017 dalam Reni Handayani et al., 2024) siswa, yang merupakan generasi penerus, dapat berperan sebagai agen perubahan yang berkontribusi dalam perjuangan melawan korupsi melalui pendidikan anti-korupsi. Tujuan pendidikan anti-korupsi adalah mencegah korupsi dengan mengajarkan individu cara berperilaku yang menolak korupsi. Pendidikan anti-korupsi tidak akan berhasil jika siswa tidak mengembangkan sikap anti-korupsi. Program pendidikan anti-korupsi yang berfokus pada pembentukan karakter anti-korupsi akan memperkuat idealisme dan integritas generasi muda, sehingga siswa dapat melihat korupsi sebagai tindakan ilegal yang harus dihentikan, ditangani, dan diberantas segera. Untuk membangun budaya anti-korupsi, hal utama yang perlu dipertimbangkan adalah tujuan pendidikan nilai. Konsep dasar pendidikan anti-korupsi secara filosofis mencakup internalisasi pemahaman tentang korupsi (ontologis), penguasaan praktik-praktik korupsi (epistemologis), dan penerapan norma-norma anti-korupsi dalam tindakan (aksiologis) guna menghindari perilaku korup. Pendidikan anti-korupsi harus dipromosikan secara formal dan informal mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi. Generasi muda harus melindungi diri mereka dari tindakan korupsi. Mereka memiliki potensi untuk berfungsi sebagai kekuatan etika, pengawas masyarakat, dan agen perubahan dalam semua sektor pembangunan nasional. Diharapkan, dengan mengimplementasikan pendidikan anti-korupsi di universitas, mahasiswa akan lebih mudah dibekali dan termotivasi oleh nilai-nilai anti-korupsi, sehingga mereka terhindar dari tindakan pidana korupsi serta konsekuensinya. Lingkungan universitas adalah tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman tentang anti-korupsi. Mengingat bahwa korupsi adalah masalah sosial yang serius yang berdampak pada seluruh masyarakat dan negara, pendidikan tentang anti-korupsi serta penanaman nilai integritas adalah dasar yang sangat penting untuk mencegah bahaya korupsi sejak dini (Reni Handayani et al., 2024).

C. Strategi Mahasiswa dalam Pencegahan Korupsi di Era Modern

Di tengah perkembangan zaman saat ini yang semakin kompleks, pendidikan tinggi memiliki peran strategis dalam membentuk karakter serta integritas mahasiswa sebagai agen perubahan sosial. Korupsi bukan sekadar persoalan hukum atau politik, melainkan juga dilema moral yang akan berdampak pada seluruh lapisan masyarakat, termasuk salah satunya mahasiswa. Karena itu, pendidikan mengenai anti-korupsi menjadi semakin penting. Dalam konteks ini, pembahasan difokuskan mengenai bagaimana proses pembelajaran dan internalisasi nilai antikorupsi harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kurikulum. Materi terkait etika dan anti-korupsi perlu dimasukkan ke dalam berbagai mata kuliah inti seperti etika, hukum, maupun manajemen, agar mahasiswa mendapat pemahaman akademik yang kuat sekaligus membangun integritas

moral. Pembelajaran tersebut membantu mahasiswa mengenali sumber penyebab korupsi, dampaknya, serta strategi pencegahannya. Selain itu, mata kuliah khusus yang menitikberatkan pada isu antikorupsi dan kejujuran juga sangat dibutuhkan.

Dalam mata kuliah khusus tersebut, mahasiswa dapat mempelajari berbagai contoh kasus nyata, memahami isu aktual terkait korupsi, serta mengembangkan kemampuan dalam membuat keputusan yang etis. Penanaman nilai antikorupsi dapat berlangsung melalui pendekatan pembelajaran aktif, seperti studi kasus, simulasi, dan proyek lapangan, sehingga mahasiswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga mengasah kepekaan etis dalam situasi nyata. Integrasi metode seperti ini akan membantu memastikan bahwa perguruan tinggi tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul dalam hal akademik, tetapi juga individu yang memegang teguh nilai etika. Memperkuat kurikulum dengan mata kuliah mengenai etika, transparansi, dan tanggung jawab akan menjadi landasan penting bagi mahasiswa untuk memahami dampak buruk korupsi terhadap berbagai aspek masyarakat. Beragam strategi pendidikan dalam melawan korupsi dapat membentuk integritas mahasiswa dan mempersiapkan mereka menghadapi tantangan sosial yang semakin rumit (Munawwirah dan Amiruddin, 2023):

1. Kurikulum Berbasis Anti Korupsi:

Integrasi mata pelajaran yang secara khusus mengangkat tema etika, transparansi, serta upaya dalam pencegahan korupsi dapat meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai konsekuensi secara lebih luas dari sebuah tindakan korupsi. Melalui penguatan kurikulum seperti ini, maka mahasiswa dapat lebih menyadari pentingnya menjunjung integritas serta kejujuran dalam kehidupan sosial, ekonomi, maupun politik.

2. Pengembangan Etika Profesional:

Penekanan pada pembentukan etika profesional dalam kurikulum memungkinkan mahasiswa dalam memahami tanggung jawab moral dalam karier mereka kelak. Menanamkan nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, dan sikap profesional dalam dunia bisnis, penelitian, maupun profesi lain akan membantu membentuk karakter mahasiswa agar berkomitmen pada nilai positif.

3. Kegiatan Ekstrakurikuler Dan Lokakarya:

Berbagai aktivitas di luar kelas seperti seminar, lokakarya, maupun kampanye anti-korupsi akan memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk mempraktikkan nilai integritas secara langsung. Dengan mengikuti kegiatan tersebut, mahasiswa dapat merasakan manfaat dari kejujuran dan etika dalam kehidupan sehari-hari, sekaligus memperkuat pemahaman mereka terkait isu korupsi.

4. Bimbingan dan Mentoring:

Peran dosen sebagai pembimbing memiliki pengaruh besar dalam membantu mahasiswa untuk dapat memahami dan memilih tindakan etis. Melalui bimbingan personal, dosen akan mengarahkan mahasiswa untuk membuat keputusan yang tepat serta menjadi teladan yang baik. Interaksi yang terbuka antara dosen dan mahasiswa juga memungkinkan diskusi lebih mendalam mengenai isu etika dan integritas.

5. Evaluasi dan Perbaikan Berkelanjutan:

Perguruan tinggi perlu melakukan evaluasi secara rutin terhadap efektivitas program pendidikan anti-korupsi. Dengan mengamati umpan balik mahasiswa serta perubahan perilaku yang terjadi, institusi dapat menyesuaikan metode pembelajaran agar tetap relevan dan efektif dalam menghadapi tantangan yang terus berkembang.

6. Penguatan Kode Etik dan Institusi:

Penerapan atau pembaruan kode etik institusi merupakan dasar penting untuk mengarahkan perilaku mahasiswa dalam kegiatan akademik maupun non akademik. Kode etik yang jelas, terukur, serta diterapkan secara konsisten dapat membantu menanamkan nilai kejujuran, integritas, serta rasa tanggung jawab pada seluruh mahasiswa.

7. Kemitraan dengan Dunia Industri dan Masyarakat:

Perguruan tinggi dapat memperluas efektivitas pendidikan antikorupsi melalui kerja sama dengan sektor industri dan masyarakat. Tantangan nyata dan praktik baik yang terdapat di lingkungan eksternal dapat diintegrasikan ke dalam pembelajaran sehingga mahasiswa mendapatkan pemahaman langsung mengenai pentingnya integritas dalam kehidupan profesional dan sosial (Salsabila, I., Abdullah, A., & Ananda, C., 2023).

Salah satu cara lain untuk meningkatkan partisipasi publik adalah melalui media sosial, terutama melalui kampanye yang efektif untuk meningkatkan kesadaran publik. Dengan menggunakan platform seperti Twitter dan Facebook, berbagai organisasi masyarakat dan individu dapat meluncurkan kampanye yang menyoroti pentingnya transparansi dan akuntabilitas. Misalnya, dengan menggunakan hashtag yang menarik perhatian, masyarakat dapat didorong untuk berpartisipasi dalam diskusi yang lebih luas, seperti #StopCorruption atau #Let'sMonitor. Kampanye-kampanye ini tidak hanya meningkatkan pemahaman tentang korupsi, tetapi juga mendorong warga untuk melaporkan tindakan korupsi yang mereka saksikan di komunitas mereka. Media sosial memberikan kesempatan bagi orang untuk berbagi informasi secara langsung. Ketika praktik korupsi terungkap, pengguna media sosial dapat segera mempublikasikan berita tersebut bersama dengan bukti pendukung. Hal ini menciptakan tekanan sosial yang berarti bagi pihak berwenang untuk menanggapi laporan-laporan tersebut. Misalnya, jika seseorang mengunggah video atau foto yang menunjukkan tindakan korupsi, informasi tersebut dapat menyebar dengan cepat, menarik perhatian media dan masyarakat, sehingga mendorong lembaga penegak hukum untuk mengambil tindakan (Rafael Christian Wijaya, 2024).

Media sosial juga memainkan peran penting dalam membentuk komunitas yang peduli terhadap isu korupsi. Melalui grup atau forum di platform seperti Facebook, orang-orang dengan minat serupa dapat berkumpul dan bertukar informasi, pengalaman, serta cara-cara untuk melawan korupsi. Komunitas-komunitas ini dapat menjadi jaringan dukungan yang saling membantu dalam mengumpulkan data dan menyusun laporan yang lebih mendalam tentang praktik-praktik korupsi. Selain itu, komunitas-komunitas ini dapat berfungsi sebagai sumber pendidikan bagi anggotanya, meningkatkan pemahaman mereka tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks pengawasan publik (Rafael Christian Wijaya, 2024).

D. Hambatan Mahasiswa dalam Melaksanakan Peran Antikorupsi

Pemanfaatan media sosial sebagai sarana mendukung pencegahan korupsi di Indonesia sebenarnya menawarkan peluang besar. Namun demikian, ada berbagai hambatan yang dapat mengurangi efektivitasnya. Tantangan tersebut mulai dari maraknya informasi menyesatkan hingga rendahnya kemampuan masyarakat dalam memahami literasi digital, sehingga hal tersebut dapat memengaruhi upaya kolektif memberantas korupsi. Salah satu hambatan paling menonjol adalah mudahnya disinformasi dan hoaks yang menyebar melalui media sosial. Dalam konteks antikorupsi, informasi yang keliru tersebut dapat menimbulkan kebingungan serta menggerus kepercayaan publik. Shofwan menjelaskan bahwa pada era digital, berita palsu sering beredar jauh lebih cepat dibandingkan dengan fakta, sehingga masyarakat kerap menerima informasi keliru tentang isu korupsi. Contohnya, kabar palsu mengenai institusi atau pejabat tertentu dapat merusak reputasi mereka tanpa dasar yang jelas, mengganggu proses hukum, serta mengalihkan perhatian publik dari kasus korupsi yang sebenarnya penting. Kurangnya literasi digital masyarakat juga dapat memperburuk keadaan. Natalia juga menemukan bahwa banyak pengguna media sosial masih belum mampu membedakan sumber yang kredibel dan yang tidak. Akibatnya, mereka dapat dengan mudah diyakinkan oleh hoaks yang menyesatkan, sehingga melemahkan gerakan antikorupsi. Karena itu, pelatihan literasi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat menilai informasi secara kritis (Rafael Christian Wijaya, 2024).

Tantangan lain dalam memanfaatkan media sosial untuk mencegah korupsi adalah respon negatif yang terkadang muncul dari pihak berwenang terhadap laporan dari masyarakat. Individu yang berniat melaporkan dugaan korupsi kerap menghadapi risiko seperti intimidasi atau ancaman. Ketidakpastian mengenai perlindungan bagi para pelapor (whistleblower) membuat masyarakat ragu untuk berbicara. Banyak orang memilih diam karena takut konsekuensi sosial maupun hukum. Ketika rasa takut tersebut muncul, tingkat partisipasi publik dalam pengawasan akan menurun dan fungsi media sosial sebagai alat pencegahan korupsi menjadi kurang optimal. Maka dari itu, menciptakan lingkungan yang aman bagi pelapor sangat penting agar masyarakat berani berpartisipasi dalam upaya pemberantasan korupsi (Nurhasanah Program Studi Manajemen et al., 2024).

Mahasiswa juga menghadapi berbagai hambatan dalam membangun budaya integritas dan nilai antikorupsi di lingkungan kampus maupun masyarakat. Salah satu persoalan utama adalah minimnya pemahaman dan kesadaran mengenai konsep integritas itu sendiri. Tidak sedikit mahasiswa yang belum sepenuhnya mengetahui apa yang dimaksud dengan korupsi, dampaknya bagi masyarakat, serta mengapa integritas perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan formal tentang etika dan integritas pun sering kali tidak menjadi fokus utama di perguruan tinggi. Oleh karena itu, kampus perlu menyiapkan program edukasi yang rutin dan menarik agar pemahaman mahasiswa mengenai integritas semakin kuat. Pembelajaran sebaiknya tidak hanya bersifat teoritis tetapi juga berkaitan dengan situasi nyata di sekitar lingkungan mereka juga. Tantangan lain muncul dari budaya kampus yang tidak selalu mendukung praktik antikorupsi. Sikap seperti suap, nepotisme, atau ketidakadilan dalam penilaian dapat saja terjadi. Ketika perilaku semacam ini dianggap lumrah, mahasiswa akan merasa bahwa menjaga integritas tidak membawa hasil apa pun. KPK bahkan menyebut sektor pendidikan sebagai salah satu yang paling banyak ditemukan kasus korupsi, walaupun tidak semuanya terjadi dalam lingkungan kampus.

Oleh karena itu, kepemimpinan perguruan tinggi perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan nilai integritas. Kebijakan antikorupsi harus diterapkan secara konsisten, dan para pimpinan kampus juga harus memberi teladan nyata dalam perilaku sehari-hari. Mereka harus memastikan bahwa tindakan korupsi tidak dibiarkan terjadi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, kampus memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki anggaran ataupun tenaga ahli untuk menyelenggarakan program pendidikan integritas secara rutin. Dukungan manajemen kampus menjadi kunci agar fasilitas dan pendanaan untuk kegiatan antikorupsi dapat terpenuhi. Perguruan tinggi juga dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti membuat konten edukatif atau mengadakan kegiatan daring guna menjangkau lebih banyak mahasiswa. Upaya-upaya tersebut dapat membantu menciptakan pendidikan integritas yang lebih efektif dan efisien.

Oleh karena itu, kepemimpinan perguruan tinggi perlu menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan nilai integritas. Kebijakan antikorupsi harus diterapkan secara konsisten, dan para pimpinan kampus juga harus memberi teladan nyata dalam perilaku sehari-hari. Mereka harus memastikan bahwa tindakan korupsi tidak dibiarkan terjadi dan memberikan sanksi tegas kepada pelaku pelanggaran. Selain itu, kampus memerlukan sistem pengawasan internal yang efektif untuk mencegah peluang terjadinya korupsi. Tantangan lainnya adalah keterbatasan sumber daya. Banyak perguruan tinggi yang tidak memiliki anggaran ataupun tenaga ahli untuk menyelenggarakan program pendidikan integritas secara rutin. Dukungan manajemen kampus menjadi kunci agar fasilitas dan pendanaan untuk kegiatan antikorupsi dapat terpenuhi. Perguruan tinggi juga dapat berinovasi dengan memanfaatkan teknologi digital, seperti membuat konten edukatif atau mengadakan kegiatan daring guna menjangkau lebih banyak mahasiswa. Upaya-upaya tersebut dapat membantu

menciptakan pendidikan integritas yang lebih efektif dan efisien (Nurhasanah Program Studi Manajemen et al., 2024).

Hambatan utama adalah kurangnya literasi digital di kalangan siswa. Terlepas dari fakta bahwa generasi muda lebih terbiasa dengan teknologi, mereka masih tidak memahami secara mendalam bagaimana teknologi tersebut dapat digunakan untuk mencegah korupsi. Selain itu, ada masalah dengan mendapatkan data dan informasi yang terbuka. Meskipun pemerintah telah berusaha untuk memberikan akses publik ke data keuangan dan anggaran, tidak semua siswa memiliki kemampuan analisis yang cukup untuk melihat data tersebut. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah, lembaga pendidikan, dan organisasi masyarakat sipil harus bekerja sama. Universitas dapat membantu dengan menawarkan kursus khusus yang berfokus pada literasi digital dan pencegahan korupsi. Sehingga mahasiswa dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pencegahan korupsi, mereka harus dibekali keterampilan analisis data dan pengetahuan tentang undang-undang antikorupsi. Selain itu, pemerintah harus memastikan bahwa siswa dan masyarakat umum dapat dengan mudah mendapatkan informasi tentang pengelolaan anggaran publik (Lawrence, 2024).

Menurut Kesuma et al., (2025 dalam Fitro Yasin et al., 2025) Hambatan yang lainnya adalah modern yaitu Media sosial. Meskipun memiliki potensi besar, implementasi pendidikan antikorupsi di era digital tidak lepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah keterbatasan sumber daya, akses internet yang tidak merata, kurangnya pendampingan dari orang tua dan guru dalam aktivitas daring siswa, serta rendahnya kemampuan literasi digital di beberapa kalangan juga menjadi kendala yang signifikan. Generasi muda perlu dibekali dengan kemampuan berpikir kritis, memilah informasi, dan memahami dampak sosial dari konten yang mereka konsumsi dan produksi. Oleh karena itu, penguatan literasi digital dan literasi moral perlu menjadi bagian integral dari pendidikan antikorupsi, terutama dalam membangun kesadaran bahwa tindakan sekecil apapun yang tidak jujur atau merugikan orang lain adalah bentuk korupsi yang tidak boleh ditoleransi. Pendidikan juga perlu melibatkan pendekatan kolaboratif antara guru, orang tua, masyarakat, dan tokoh digital yang berpengaruh untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang sehat dan berkarakter.

KESIMPULAN

Mahasiswa memiliki peran krusial sebagai agen perubahan dalam pencegahan korupsi, terutama dengan memanfaatkan era digital yang menyediakan berbagai platform untuk edukasi, kampanye, dan pengawasan publik. Pengintegrasian nilai-nilai anti-korupsi dan integritas ke dalam kurikulum pendidikan tinggi serta peningkatan literasi digital menjadi faktor kunci yang menentukan efektivitas peran siswa. Meski tantangan seperti rendahnya pemahaman teknologi dan hambatan sosial masih ada, dengan dukungan institusional dan lintas sektor, mahasiswa dapat menjadi pelopor budaya bersih dan transparan. Upaya mahasiswa tidak hanya dalam kegiatan akademik tetapi juga dalam inovasi teknologi dan media sosial mampu mendorong partisipasi masyarakat luas dalam pemberantasan korupsi. Oleh karena itu, perguruan tinggi dan pemerintah perlu memperkuat peran pelajar melalui program pelatihan, pendampingan, serta dukungan kebijakan yang mampu untuk memperkuat pemberantas korupsi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Dewi, N. N., Mulyani, S., & Auliya, N. (2025). Mahasiswa sebagai Agen Perubahan dalam Pencegahan Korupsi melalui Pendidikan Antikorupsi. *JIMAPPKPA*, 2–14.
<https://www.researchgate.net/publication/396912169>
- Dwi Sartika, Y. (2018). GAYA HIDUP HEDONIS DAN INTENSI KORUPSI PADA MAHASISWA PENGURUS LEMBAGA INTRA KAMPUS. *Agustus*, 06(02), 213–229.

-
- Fitro Yasin, R., Abzar Al Isfahany, M., & Yudha Satria Utama, D. (2025). PERAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM MEMBENTUK GENERASI BERINTEGRITAS DI ERA DIGITAL. *Jurnal Ilmiah Multidisiplin Terpadu*, 9, 464–465.
- Lawrence, J. (2024). PENCEGAHAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI ERA DIGITAL: PERAN DAN KESADARAN MAHASISWA. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6 No.10. <https://doi.org/doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Munawwirah, Z., & Amiruddin. (2023). Strategi Pendidikan Anti-Korupsi: Membangun Integritas dan Karakter Kejujuran Mahasiswa di Era Modern. *Jurnal Seumubeuet*, 2 No. 2, 118–121.
- Nurhasanah Program Studi Manajemen, S., Ekonomi dan Bisnis, F., Bandar Lampung Il Pagar Alam No, U. Z., Ratu, L., Labuhan ratu, K., & Bandar Lampung, K. (2024). PERAN MAHASISWA SEBAGAI PILAR INTEGRITAS DALAM GERAKAN ANTI KORUPSI DI LINGKUNGAN KAMPUS DAN MASYARAKAT. *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 6. <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>
- Rafael Christian Wijaya. (2024). Peran Media Sosial dalam Pengawasan dan Pencegahan Korupsi di Indonesia. *Birokrasi: JURNAL ILMU HUKUM DAN TATA NEGARA*, 2(4), 271–279. <https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i4.1657>
- Reni Handayani, A., Sholihah, N., Lestari, A., Rafi, ah, Griya Husada Sumbawa Alamat Kampus, S., Lingkar Kebayan, J., Besar, S., & Bara, B. (2024). Pendidikan Anti Korupsi Dan Integritas Pada Mahasiswa S1 Keperawatan Stikes Griya Husada Sumbawa. *Jurnal Kajian Ilmu Hukum dan Politik*, 2(1), 348–353. <https://doi.org/10.51903/jaksa.v2i1.1740>